



TILIK DATA

Arah dan Agenda Pembangunan Berdasarkan APBN 2026

Radhityana Muhammad
Nadia Restu Utami

Maret 2026

Ringkasan Eksekutif

- 1. Kinerja APBN 2025 tidak sesuai harapan.** Realisasi pendapatan pada APBN Tahun 2025 mengalami *shortfall* atau turun 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak mengalami penurunan hingga mencapai 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau hanya terealisasi 77%. Kondisi ini perlu menjadi alarm adanya potensi penurunan daya beli pada masyarakat.
- 2. APBN 2026 disusun lebih optimis dibandingkan dengan realisasi APBN 2025.** Hal ini terlihat pada target penerimaan pajak yang meningkat hingga 40% bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2025. Kemudian pada tahun 2026 diperkirakan kebijakan pembangunan akan banyak dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari peningkatan belanja pemerintah pusat yang diiringi dengan penurunan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
- 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 3,8%,** utamanya disebabkan oleh penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan anjlok sebesar -84,7%. Kondisi ini disinyalir sebagai dampak dari dividen BUMN yang kini tergerus, diambil alih oleh Danantara.
- 4. Badan Gizi Nasional (BGN) mendominasi anggaran belanja K/L.** BGN menjadi lembaga dengan anggaran terbesar (Rp268 triliun, 17,7% dari total anggaran K/L), melampaui Kementerian Pertahanan (Rp187,1 triliun) dan Polri (Rp146 triliun).
- 5. Anggaran pendidikan diklaim tertinggi dalam sejarah, tetapi didorong oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG).** Total anggaran pendidikan mencapai Rp769,1 triliun, namun Rp233,6 triliun (47,5% dari komponen belanja pusat untuk pendidikan) dialokasikan untuk program MBG. Akibatnya, anggaran pendidikan melalui transfer daerah turun 24%, DAU & DBH untuk pendidikan turun 40%, dan DAK Fisik untuk sarana prasarana sekolah ditiadakan sepenuhnya.
- 6. Alih-alih menjawab permasalahan kualitas pendidikan Indonesia yang kalah saing dengan negara ASEAN lainnya, anggaran MBG yang terlalu besar menyebabkan misalokasi** untuk meningkatkan taraf dan mutu pendidikan generasi mendatang. Selain itu, anggaran MBG yang disasar untuk perbaikan gizi, nyatanya hanya terpusat di daerah yang minim risiko gizi buruk dan *stunting*.

Realisasi APBN 2025

Uraian (Triliun Rupiah)	APBN 2024	LKPP 2024	% Realisasi 2024	APBN 2025	Realisasi Sementara per 31 Des 2025	% Realisasi 2025	Perubahan 2024-2025	UU APBN 2026	Perubahan 2025-2026	Realisasi APBN Jan 2026 (atas & Jan 2025 (bawah)
A. Pendapatan Negara	2.802,3	2.850,6	102%	3.005,1	2.756,3	92%	-3,3%	3.153,5	14%	172,7 (157,8)
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.801,9	2.816,2	101%	3.004,6	2.451,7	82%	-12,9%	3.152,9	29%	172,7 (157,8)
1. Penerimaan Perpajakan	2.309,9	2.231,8	97%	2.490,9	1.917,6	77%	-14,1%	2.693,7	40%	138,9 (115,2)
2. PNBPN	492,0	584,4	119%	513,6	534,1	104%	-8,6%	459,1	-14%	33,9 (42,5)
II. Penerimaan Hibah	0,4	34,4	7997%	0,6	4,3	741%	-87,5%	0,6	-86%	-
B. Belanja Negara	3.325,1	3.359,8	101%	3.621,3	3.451,4	95%	2,7%	3.842,7	11%	227,3 (180,8)
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.467,5	2.496,2	101%	2.701,4	2.602,3	96%	4,2%	3.149,7	21%	131,9 (86)
1. Belanja K/L	1.090,8	1.324,0	121%	1.160,1	1.500,4	129%	13,3%	1.510,5	1%	55,8 (24,4)
2. Belanja non-K/L	1.376,7	1.172,2	85%	1.541,4	1.102,0	71%	-6,0%	1.639,1	49%	76,1 (61,7)
II. Transfer ke Daerah	857,6	863,5	101%	919,9	849,0	92%	-1,7%	692,9	-18%	95,3 (94,7)
C. Keseimbangan Primer	-25,5	-20,7	81%	-63,3	-180,7	285%	771,5%	-89,7	-50%	-4,2 (-11,1)
D. Surplus (Defisit)	-522,8	-509,2	97%	-616,2	-695,1	113%	36,5%	-689,1	-1%	-54,6 (-23)
% terhadap PDB	-2,3	-2,3	100%	-2,5	-2,9	115%	27,0%	-2,7	-8%	-0,21 (-0,09)
E. Pembiayaan Anggaran	522,8	554,9	106%	616,2	744,0	121%	34,1%	689,1	-7%	105,1 (154,8)

(angka dalam kurung berdasarkan realisasi per Januari 2025)

Realisasi APBN 2025 menunjukkan realisasi pendapatan negara mengalami *shortfall* (92%) atau tumbuh -3,3%, yang sebagian besar disumbang oleh penurunan perpajakan sebesar -14,1% dibandingkan dengan tahun 2024. Lebih lanjut, realisasi belanja non-K/L tampak mengalami penurunan yang diindikasikan oleh menurunnya belanja hibah, bansos, dan subsidi. Di sisi lain, belanja K/L mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 13,3%.

Hal menarik tampak pada keseimbangan primer yang meningkat tajam 771,5% atau naik hampir 7 kali lipat dibandingkan tahun 2024. Sejalan dengan itu, pembiayaan naik 34,1% mengisyaratkan bahwa untuk menutup defisit, pemerintah menarik utang lebih banyak pada tahun 2025. Kondisi ini terus berlanjut hingga Januari 2026, di mana defisit lebih lebar dibandingkan Januari 2025, mencerminkan bahwa risiko fiskal dari defisit dan pembiayaan utang akan menjadi ancaman serius ke depan.

Sumber: Kementerian Keuangan (2026)

Postur Penerimaan APBN 2026

Uraian	LKPP 2021	LKPP 2022	LKPP 2023	LKPP 2024	Outlook 2025	RAPBN 2026	UU APBN 2026	Perubahan 2025-2026
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.006,3	2.630,1	2.766,7	2.816,2	2.864,5 (2.451,7)	3.147,0	3.152,9	10,1% (29%)
1. Penerimaan Perpajakan	1.547,8	2.034,6	2.154,2	2.231,8	2.387,3 (1.917,6)	2.692,0	2.693,7	12,8% (40%)
<i>a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri</i>	1.474,1	1.943,7	2.089,7	2.158,0	2.305,6	2.599,6	2.601,2	12,8%
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	696,7	998,2	1.061,2	1.061,9	1.051,7 (915,3)	1.209,4	1.209,4	15,0% (32,1%)
a) Pendapatan PPh Migas	52,8	77,8	68,8	65,1	54,1	55,2	55,2	2,0%
b) Pendapatan PPh Nonmigas	643,8	920,4	992,5	996,8	997,5	1.154,1	1.154,1	15,7%
2) PPN dan PPnBM	551,9	687,6	763,6	828,4	890,9 (790,2)	995,3	995,3	11,7% (25,6%)
3) Pajak Bumi dan Bangunan	18,9	23,3	33,3	32,5	30,1	26,1	26,1	-13,3%
4) Cukai	195,5	226,9	221,9	226,4	228,7	241,8	243,5	6,5%
5) Pajak Lainnya	11,1	7,7	9,7	8,7	104,2	126,9	126,9	21,8%
<i>b. Pajak Perdagangan Internasional</i>	73,7	90,9	64,5	73,9	81,7	92,5	92,5	13,2%
1) Bea Masuk	39,1	51,1	50,9	53,0	53,8	49,9	49,9	-7,2%
2) Bea Keluar	34,6	39,8	13,6	20,9	27,9	42,6	42,6	52,7%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	458,5	595,6	612,5	584,4	477,2 (534,1)	455,0	459,2	-3,8% (-14%)
<i>a. Pendapatan SDA</i>	149,5	268,8	254,2	228,9	230,1	236,6	236,6	2,8%
1) SDA Migas	96,6	148,7	116,2	110,6	114,6	113,1	113,1	-1,3%
a) Minyak Bumi	65,0	112,0	87,4	78,0	81,6	80,2	80,2	-1,7%
b) Gas Bumi	31,6	36,7	28,8	32,7	33,0	32,9	32,9	-0,3%
2) SDA Nonmigas	52,9	120,1	138,0	118,3	115,5	123,5	123,5	6,9%
a) Mineral dan Batu Bara	44,8	110,8	129,1	107,8	105,7	113,4	113,4	7,3%
b) Perhutanan	5,4	5,8	5,4	6,7	5,9	5,9	5,9	0,0%
c) Perikanan	0,7	1,2	0,6	1,0	1,6	1,7	1,7	6,2%
d) Panas Bumi	1,9	2,3	2,8	2,8	2,3	2,6	2,6	13,0%
<i>b. Kekayaan Negara Dipisahkan</i>	30,5	40,6	82,1	86,4	11,8	1,8	1,8	-84,7%
<i>c. PNBP Lainnya</i>	152,5	196,3	180,4	164,3	136,0	118,3	122,5	-9,9%
<i>d. BLU</i>	126,0	89,9	95,9	104,7	99,3	98,3	98,3	-1,0%
II. PENERIMAAN HIBAH	5,0	5,7	17,2	34,4	1,0 (4,3)	0,7	0,6	-40,0% (-86%)
PENDAPATAN NEGARA	2.011,3	2.635,8	2.783,9	2.850,6	2.865,5 (2.756,3)	3.147,7	3.153,5	10,1% (14%)

(angka dalam kurung berdasarkan realisasi per 31 Desember 2025)

Penerimaan perpajakan tahun 2026 ditargetkan tumbuh 40% dibandingkan realisasi pada akhir tahun 2025, meskipun pada tahun 2025 terjadi *shortfall* penerimaan sebesar 14,1%. Pemerintah merencanakan peningkatan penerimaan perpajakan tahun 2026 dengan mengandalkan kontribusi utama dari PPh, PPN, dan PPnBM. Strategi ini menempatkan konsumsi domestik dan aktivitas usaha sebagai motor utama pemulihan penerimaan negara.

Di sisi PNBP, kinerja penerimaan secara agregat mengalami penurunan. Utamanya disebabkan oleh penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan mengalami penurunan signifikan -84,7% sebagai dampak dari dividen BUMN yang kini diambil alih oleh Danantara. Selain itu, melemahnya pendapatan sektor migas seiring dengan dinamika harga komoditas global turut berkontribusi menurunkan penerimaan. Meski demikian, PNBP nonmigas menunjukkan tren pertumbuhan, yang mencerminkan adanya peluang diversifikasi sumber penerimaan negara di luar migas yang meliputi penerimaan mineral dan panas bumi.

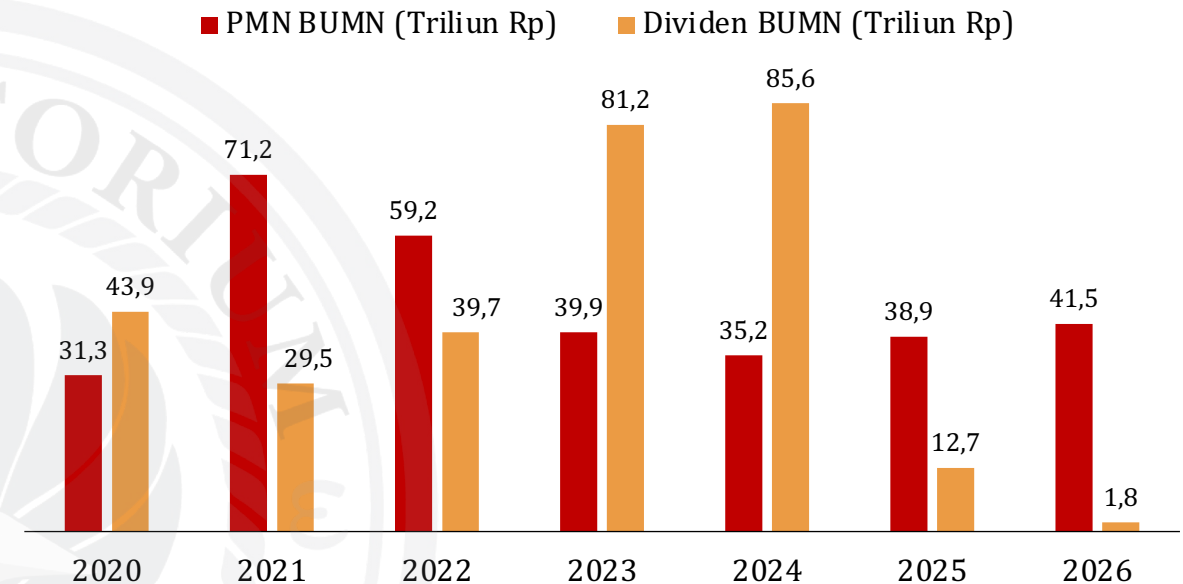
Sumber: Kementerian Keuangan (2026)

Kekayaan Negara Dipisahkan & Implikasi Danantara

Sumber Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)



Penyertaan Modal Negara (PMN) & Dividen BUMN



Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) merupakan aset/modal negara yang diserahkan kepada BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Atas kepemilikan ini, **negara berhak menerima dividen/laba yang dicatat sebagai PNBP**. Namun, berdasarkan **UU No.1/2025 dividen BUMN dialihkan kepada Danantara** sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang digadang-gadang memiliki aset terbesar di dunia senilai Rp14.700T. Meski demikian, pada awal pembentukan Danantara, lembaga ini tetap mengandalkan suntikan permodalan dari APBN sebesar Rp325T yang merupakan hasil kebijakan Inpres efisiensi di awal tahun 2025. Di sisi lain, kehadiran Danantara membuat APBN kehilangan sumber KND yang terlihat dari **dividen BUMN ke kas negara anjlok 97,9%** — dari rekor Rp85,6T (2024) menjadi hanya Rp1,8T di APBN 2026. Di saat negara menjalankan program populis berbiaya besar (MBG Rp268T, Kopdes Merah Putih Rp181T), sumber penerimaan organik justru digerus. **Tanpa transparansi rezim perpajakan Danantara dan mekanisme akuntabilitas di luar APBN, risiko fiskal struktural Indonesia dapat jauh lebih besar** dari angka defisit 2,7% PDB yang tertera dalam APBN 2026.

Postur Belanja APBN 2026

Uraian	LKPP 2024	APBN 2025	Outlook 2025	Perubahan 2024-2025	RAPBN 2026	UU APBN 2026	Perubahan 2025-2026
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.496,2	2.701,4	2.663,5 (2602,3)	6,7% (4,3%)	3.136,5	3.149,7	18,3% (21%)
1. Belanja Pegawai	464,9	521,5	520,2 (487,8)	11,9% (4,9%)	580,7	582,2	11,9% (19,4%)
2. Belanja Barang Jasa	523,4	486,9	479,2 (564,9)	-8,4% (7,9%)	706,7	707,5	47,6% (25,2%)
3. Belanja Modal	355,5	234,1	344,3 (427,5)	-3,1% (20,3%)	274,2	284,1	-17,5% (-33,5%)
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	488,4	552,9	552,1 (514,4)	11,5% (5,3)	599,4	599,4	8,6% (16,5%)
5. Subsidi	292,7	307,9	288,1 (281,6)	-1,6% (-3,8%)	318,9	318,9	10,7% (13,2%)
6. Belanja Hibah	0,3	0,2	0,2	-27,6% (-33,3%)	0,4	0,4	100,0%
7. Bantuan Sosial	155,0	140,1	154,2 (186,6)	-0,5% (20,4%)	167,4	162,5	5,4% (-12,9%)
8. Belanja lain-lain	216,1	458,0	324,9 (139,3)	50,3% (-35,5%)	488,8	489,8	50,8% (251%)
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	863,5	919,9	864,1 (849)	0,1% (-1,7%)	650,0	692,9	-19,8% (-18,4%)
1. Transfer ke Daerah	792,6	848,8	795,2	0,3%	589,4	631,4	-20,6%
<i>a. Dana Perimbangan</i>	765,9	824,1	771,3	0,7%	574,0	615,6	-20,2%
<i>b. Dana Insentif Fiskal</i>	7,0	6,0	5,9	-15,7%	1,8	1,8	-69,5%
<i>c. Dana Otsus & Keistimewaan</i>	19,7	18,7	18,0	-8,6%	13,6	14,0	-22,2%
2. Dana Desa	70,9	71,0	68,9	-2,9%	60,6	60,6	-12,0%
Jumlah Belanja Negara	3.359,8	3.621,3	3.527,6 (3451,4)	5,0% (2,7%)	3.786,5	3.842,70	8,9% (11,3%)

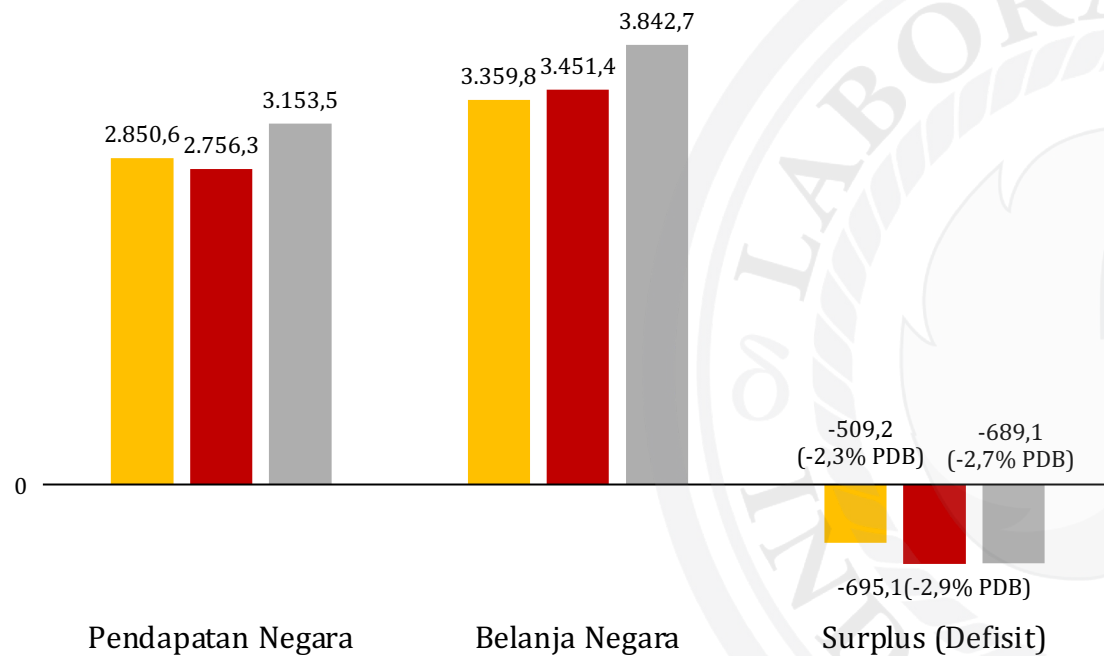
Jika dilihat berdasarkan postur APBN 2026, terlihat kontras antara **belanja pemerintah pusat** yang **tumbuh positif** mencapai 18,3%, sedangkan **transfer ke daerah turun drastis** mencapai 19,8%.

Kondisi ini semakin mengindikasikan adanya **upaya sentralisasi** yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Di tengah isu efisiensi, pemotongan TKD adalah **langkah instan guna memuluskan belanja program prioritas** pemerintah yang tercermin melalui **belanja barang jasa yang melonjak drastis, tumbuh sebesar 47,6% dibandingkan tahun 2025**. Padahal TKD memainkan peran penting bagi pembangunan daerah dan paling bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Perbandingan yang Perlu diperhatikan APBN 2026

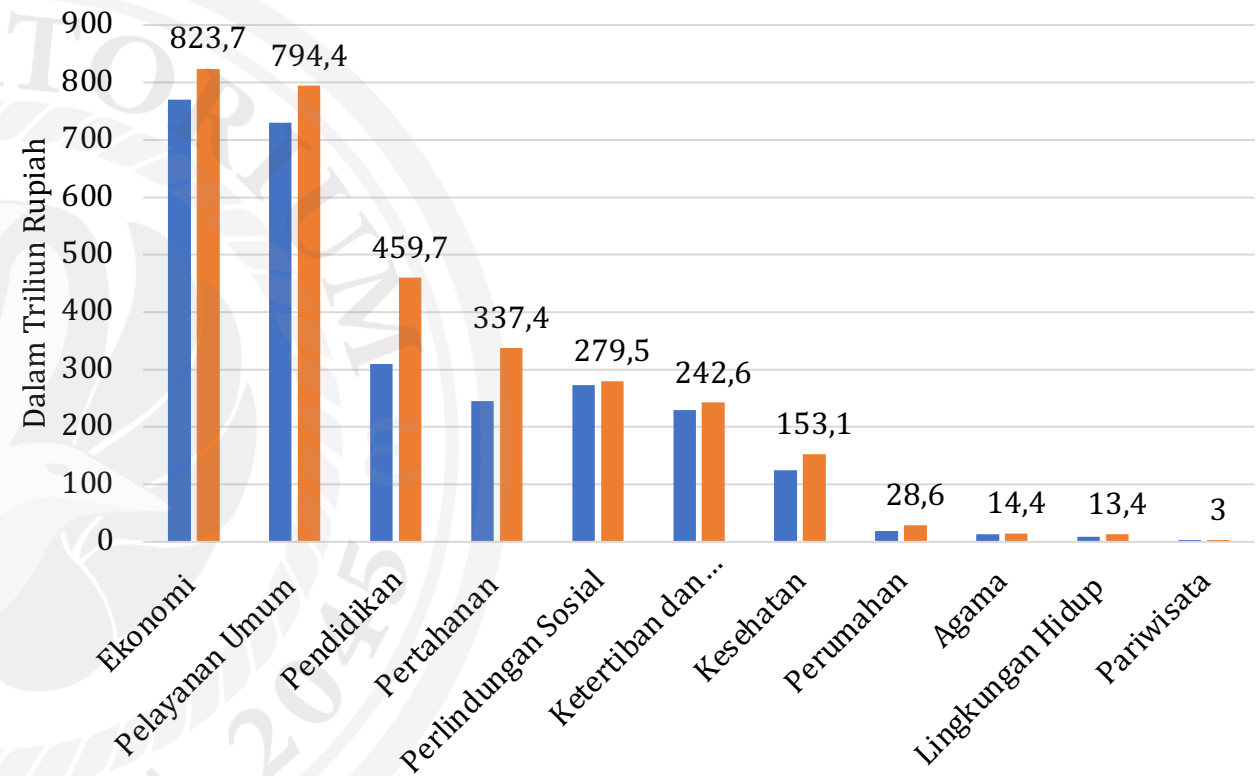
Postur APBN (Triliun Rupiah)

■ 2024 ■ Realisasi 2025 ■ UU APBN 2026



Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi

■ Outlook 2025 ■ UU APBN 2026



Belanja negara tahun 2026 melonjak tajam menjadi Rp3.842,7 triliun atau **tumbuh 11%**, jauh melebihi realisasi tahun 2024 dan 2025, dengan **konsentrasi anggaran terbesar pada belanja pusat berdasarkan fungsi ekonomi, pelayanan umum, pendidikan, dan pertahanan yang menyerap hampir separuh total belanja**. Perlu menjadi perhatian serius, lonjakan belanja negara **berisiko memperlebar defisit APBN secara struktural** dan dapat meningkat lebih buruk apabila penerimaan negara kembali gagal mencapai target, sebagaimana tercermin pada kinerja fiskal tahun 2025.

Anggaran Program Unggulan/ Prioritas

Makan Bergizi Gratis
(Anggaran: Rp268 T)
MBG: Rp247 T

Pertahanan
Kemenhan: Rp187,1 T
Dicadangkan: Rp150 T
Program Modernisasi Alutsista,
Non Alutsista, dan Sarpas
Pertahanan: Rp84 T

Pendidikan
Anggaran: Rp459,7 T
MBG: Rp247 T
Sekolah Rakyat Rp27T*
Sekolah Unggul Garuda: Rp3 T*
Revitalisasi Sekolah: Rp22,5 T*

Ketahanan Pangan
Anggaran: Rp164,4 T*
(Tersebar di beberapa K/L)

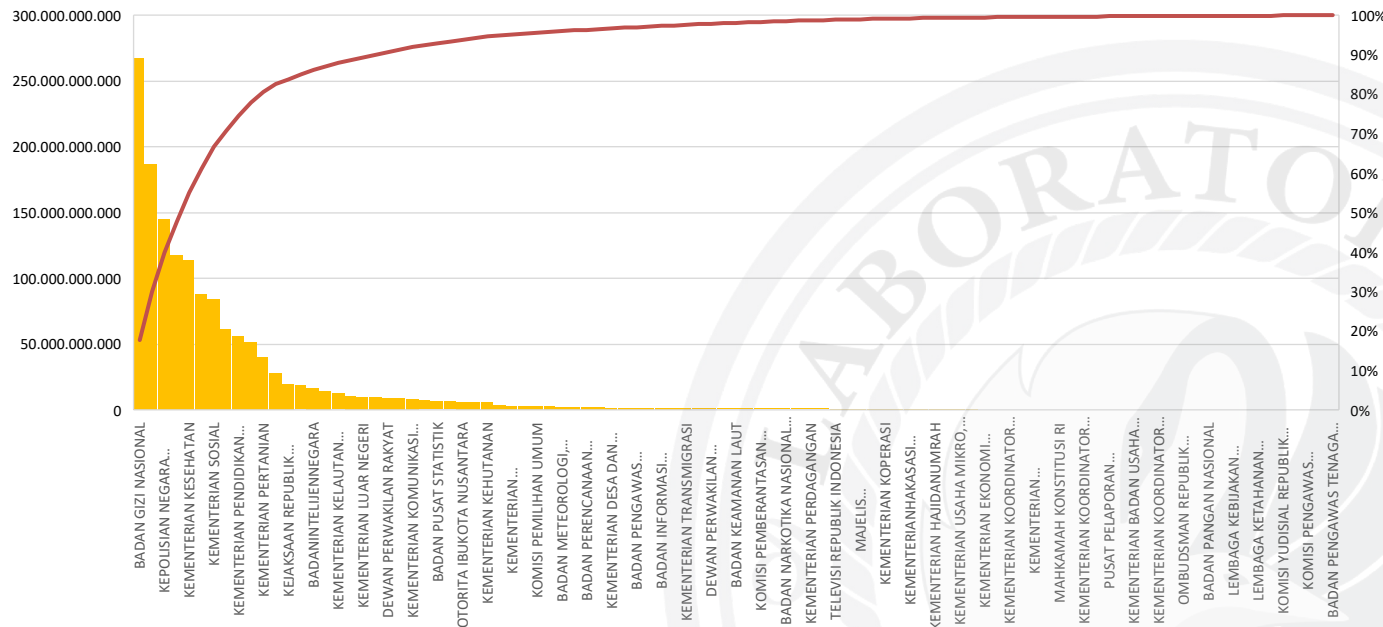
Ketahanan Energi
Anggaran: Rp402,4 T*

Koperasi Desa Merah Putih
Anggaran: Rp181,18 T*
Kemenkop: Rp962 M

Program 3 Juta Rumah
Anggaran: Rp57,7 T*
(Termasuk Subsidi)
Anggaran PKP: Rp10,8 T
Prasarana Bid Perumahan:
Rp9,8 T

Kesehatan
Anggaran: Rp244 T*
Anggaran Kemenkes:
Rp144T (Bantuan
Masyarakat:Rp58,9T)

Anggaran Berdasarkan Kementerian/ Lembaga Tahun 2026



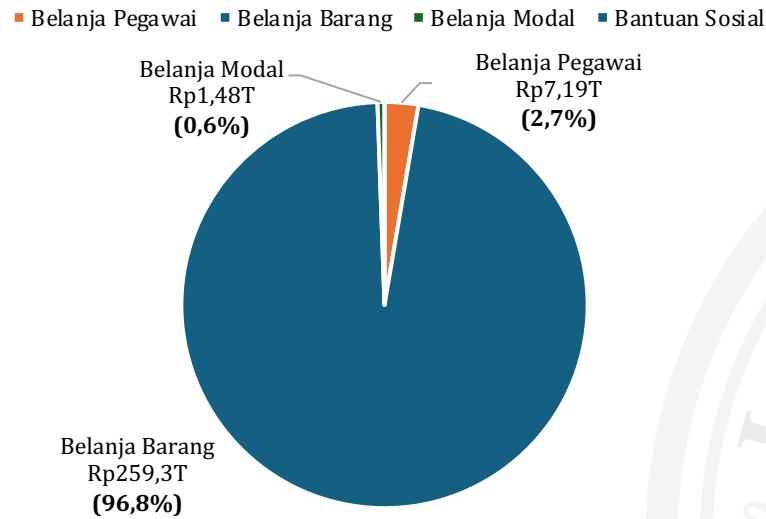
Sebesar 80% dari total anggaran diserap oleh 11 Kementerian/ Lembaga. Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki anggaran terbesar, yaitu Rp268 T atau sebesar 17% dari total anggaran K/L. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 memiliki target sebanyak 74,5 juta orang dengan anggaran Rp248 T. Kemudian, Kementerian pertahanan memiliki anggaran sebesar Rp187,1 T. Fungsi Pertahanan memiliki anggaran yang dicadangkan sebesar Rp150 T. Selanjutnya, anggaran kementerian yang membawahi bidang pendidikan juga termasuk yang terbesar, meskipun secara nominal hanya setengah dari anggaran BGN.

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran (Juta Rupiah)	Persentase
1	Badan Gizi Nasional	268.000.000	17,7%
2	Kementerian Pertahanan	187.100.000	12,4%
3	Kepolisian Negara Republik Indonesia	146.050.000	9,7%
4	Kementerian Pekerjaan Umum	118.500.000	7,8%
5	Kementerian Kesehatan	114.000.000	7,5%
6	Kementerian Agama	88.897.728	5,9%
7	Kementerian Sosial	84.440.056	5,6%
8	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi	61.873.870	4,1%
9	Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah	56.682.130	3,8%
10	Kementerian Keuangan	52.016.000	3,4%
11	Kementerian Pertanian	40.145.000	2,7%

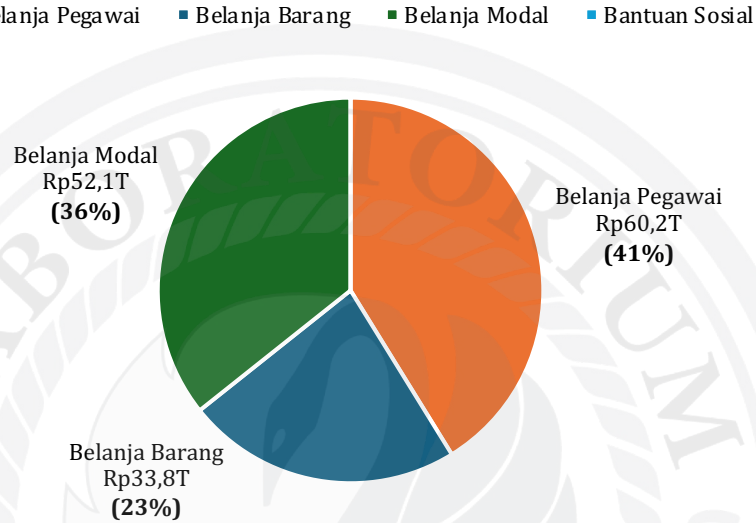
Alokasi anggaran K/L yang menempatkan BGN, Kemenhan, dan Polri sebagai tiga teratas mencerminkan pemerintahan sedang dalam fase konsolidasi kekuasaan dengan menggunakan anggaran sebagai instrumen politik melalui program populis yang berdampak cepat dan penguatan institusi keamanan. Namun ironisnya pilihan ini justru mengorbankan investasi struktural jangka panjang, terutama di sektor pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi utama pembangunan bangsa.

Komponen Belanja K/L Berdasarkan Jenis

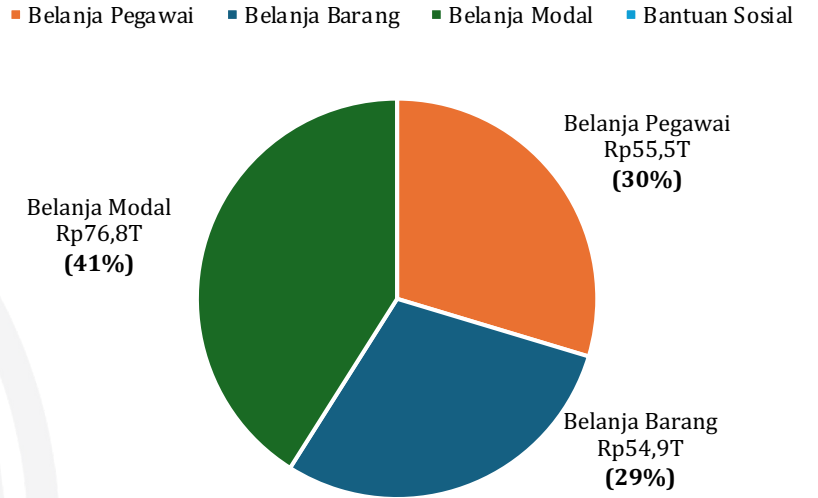
Badan Gizi Nasional (BGN)



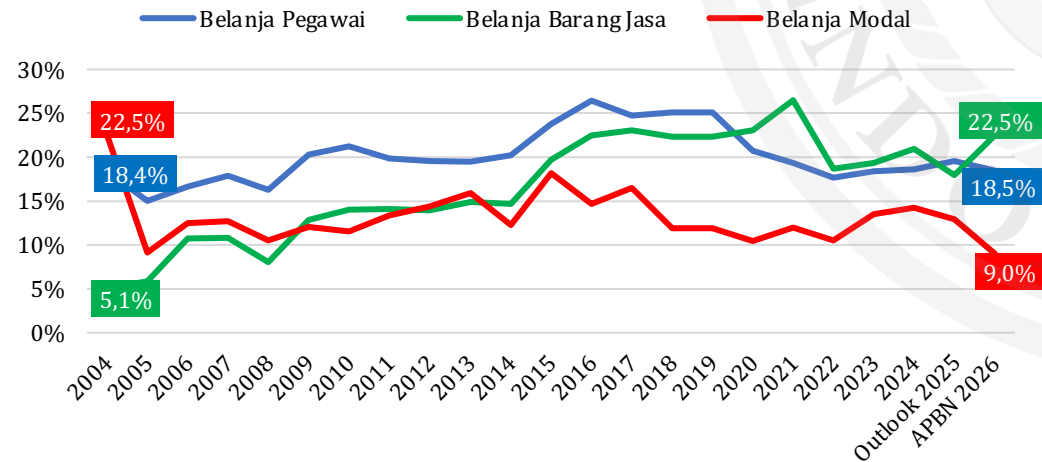
Kepolisian Negara Republik Indonesia



Kementerian Pertahanan



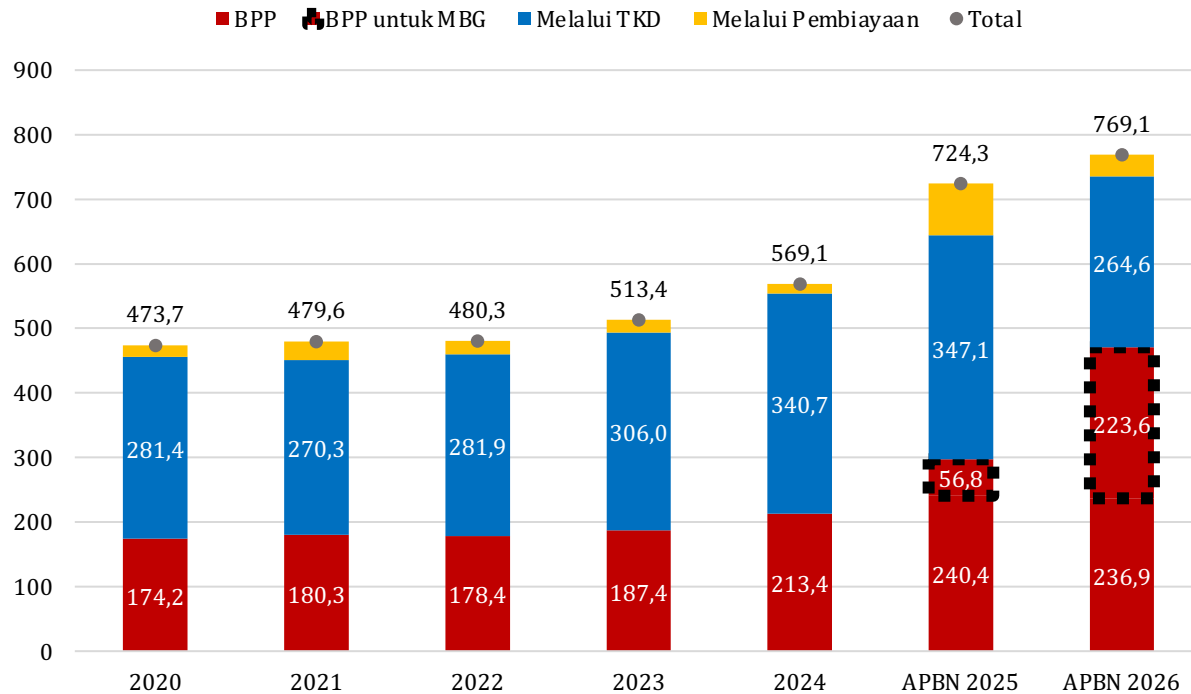
Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja



Berdasarkan komponen belanja pusat menurut jenis, **hampir 50% anggaran belanja pusat digunakan untuk belanja rutin** yang meliputi belanja barang dan belanja pegawai. Dari tiga K/L dengan anggaran terbesar, **Badan Gizi Nasional (BGN) menggunakan 97% anggarannya untuk pengadaan barang** sebagai syarat untuk pemenuhan gizi. **Polri menghabiskan hampir 50% anggaran untuk belanja pegawai.** Di sisi lain, **Kementerian Pertahanan menjadi satu-satunya kementerian yang menggunakan hampir 50% anggarannya untuk belanja modal** yang sebagian besar untuk pengadaan alutsista. Jika dilihat berdasarkan efektivitas belanja, **sejak tahun 2015 kesenjangan antara belanja barang dan modal kian melebar.** Padahal belanja ideal seharusnya mengedepankan belanja modal sebagai komponen terbesar agar menciptakan efek pengganda yang lebih tinggi.

Anggaran Pendidikan

Komponen Anggaran Pendidikan (Triliun Rupiah)

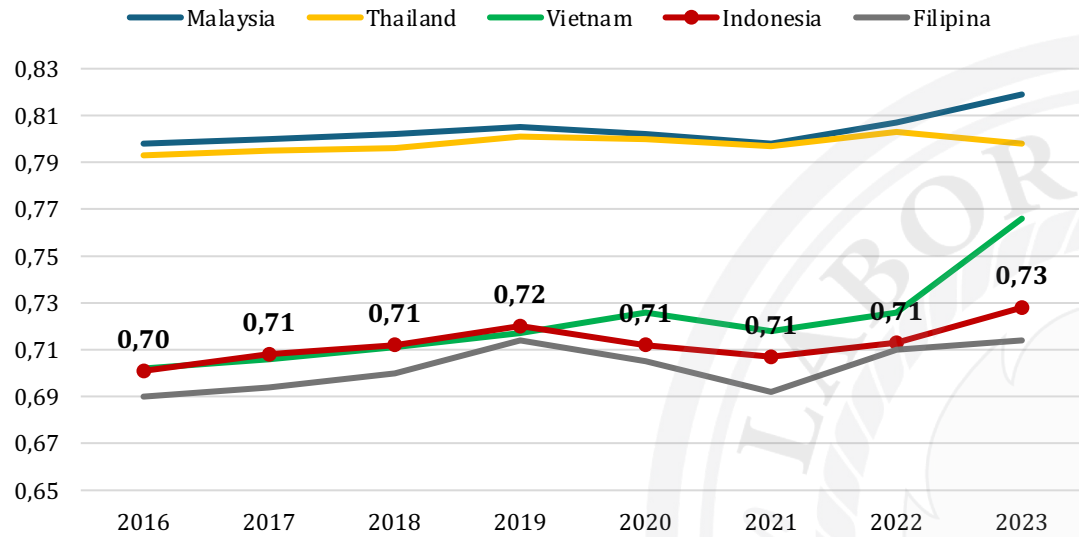


Komponen Anggaran Pendidikan (Triliun Rupiah)	Alokasi 2025	Alokasi 2026	Perubahan
Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	297,17	470,46	58%
Badan Gizi Nasional	56,80	223,56	294%
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	33,55	56,68	69%
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	57,68	61,87	7%
Anggaran Pendidikan pada K/L Lainnya	113,59	128,35	13%
Anggaran Pendidikan pada Belanja Non K/L	35,55	0,00	-100%
Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	347,09	264,62	-24%
DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	212,61	128,19	-40%
Dana Alokasi Khusus	132,14	134,33	2%
a. DAK Fisik	2,48	0,00	-100%
b. DAK Non Fisik	129,66	134,33	4%
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59,27	59,30	0%
Tunjangan Guru ASN Daerah	70,06	74,76	7%
BOSP Museum dan Taman Budaya	0,17	0,15	-12%
Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0,15	0,13	-17%
Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2,34	2,10	-10%
Anggaran Pendidikan Melalui Pembiayaan	80,00	34,00	-58%
Dana Abadi di Bidang Pendidikan	0,03	25,00	99900%
Pembiayaan Pendidikan	55,00	9,00	-84%
JUMLAH	724,26	769,09	6%

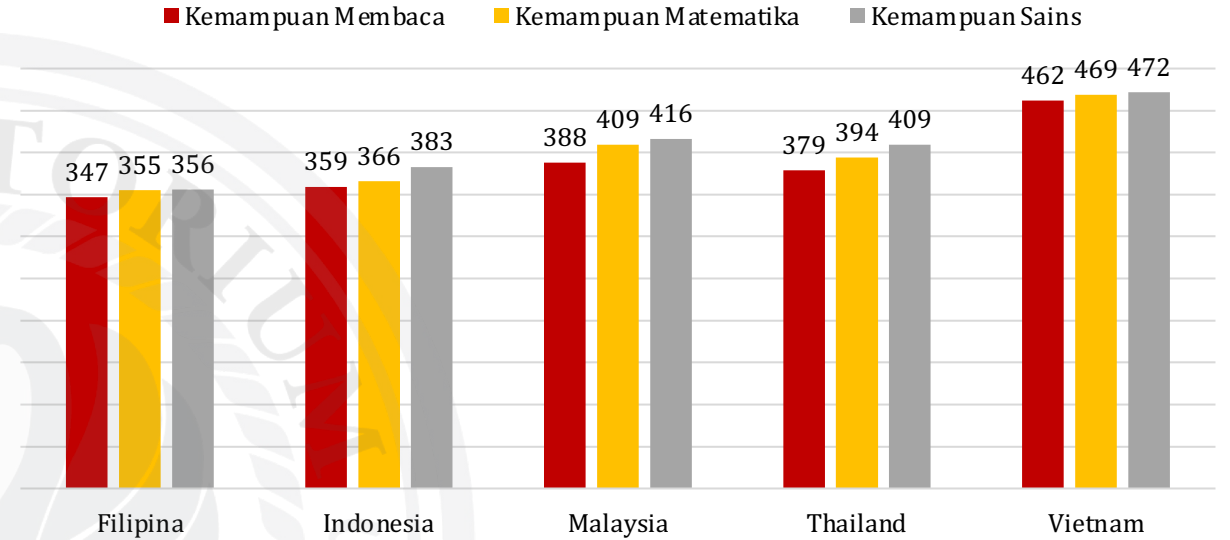
Anggaran pendidikan pada tahun 2026 mencapai Rp769,1T dengan komponen anggaran terbesar digunakan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp470,5T. Angka tersebut diklaim sebagai anggaran belanja pendidikan dari pusat terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. **Kenaikan ini disebabkan program MBG yang menghabiskan anggaran pendidikan sebesar Rp223,6T atau 47,5% dari anggaran pendidikan BPP.** Padahal sebelumnya, sebagian besar anggaran pendidikan dilimpahkan kepada daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD), namun pada tahun 2026 turun 24% menjadi Rp264,6T. **Demi MBG, anggaran TKD pendidikan melalui DAU & DBH diturunkan sebesar 40% dan DAK fisik** yang umumnya digunakan untuk pengadaan/rehabilitasi sarpras pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan lulusan terampil **kini ditiadakan.** Program MBG menyalahi konstitusi yang seharusnya anggaran pendidikan dialokasikan 20% benar-benar untuk kebutuhan pendidikan bukan untuk perbaikan gizi.

Kualitas Pendidikan

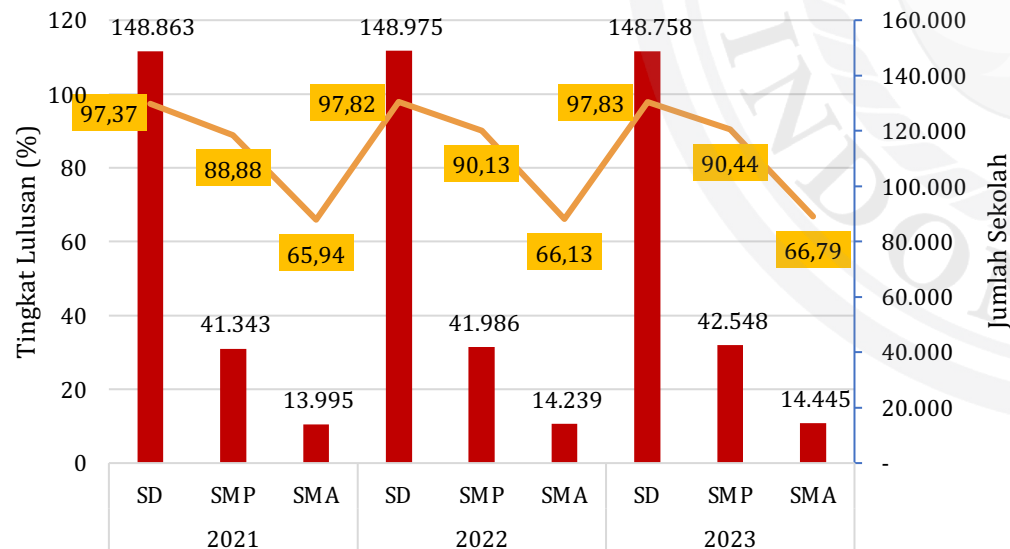
Human Development Index



Skor PISA ASEAN Tahun 2022



Tingkat Lulusan Jenjang Pendidikan

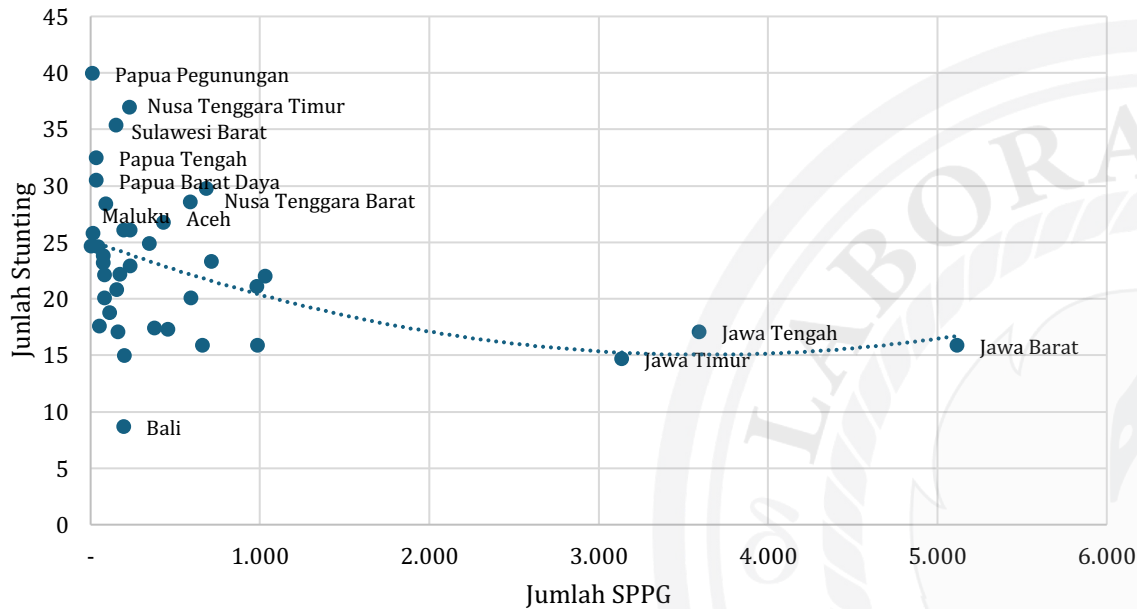


Kualitas pendidikan di Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai tantangan. Kondisi ini tercermin melalui **Human Development Indeks (HDI) masih jauh lebih rendah** dibandingkan beberapa negara ASEAN. Di sisi lain, **skor PISA** yang digunakan untuk mengukur performa akademis peserta didik usia 15 tahun **dinilai memiliki kemampuan membaca, matematika, dan sains yang jauh lebih rendah dibandingkan Vietnam, Thailand, dan Malaysia.** Permasalahan penurunan partisipasi murid antara level SD, SMP, ataupun SMA dalam jenjang pendidikan juga belum mendapat perhatian. Hal ini juga tercermin dari **jumlah sekolah antar jenjang yang tidak merata.** Jumlah SMA jauh lebih kecil dibandingkan jumlah SMP dan SD. Sayangnya, anggaran tahun 2026 untuk pembangunan infrastruktur sekolah, terutama yang bersumber dari transfer daerah melalui DAK Fisik kini dihilangkan. Alih-alih memperbaiki kualitas pendidikan dan menambah sarpras sekolah, **anggaran MBG yang terlalu besar berpotensi menyebabkan misalokasi untuk meningkatkan taraf dan mutu pendidikan generasi mendatang.**

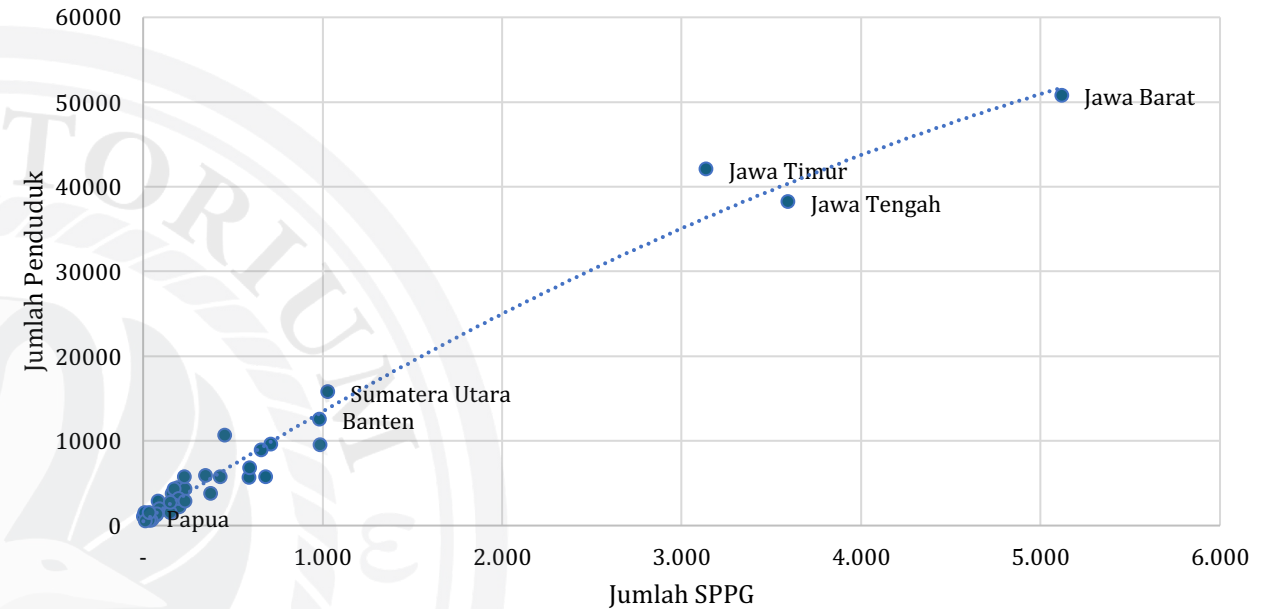
Sumber: UNDP (2025), OECD (2025) dan BPS (2025)

Apakah MBG Sudah Tepat?

Jumlah Stunting dan SPPG



SPPG X Jumlah Penduduk



MBG sebagai program prioritas pemerintah memiliki tujuan utama untuk memperbaiki gizi bagi anak sekolah serta bayi dan ibu hamil. Namun, sebaran SPPG hingga saat ini belum mencerminkan tujuan tersebut. Silang data antara SPPG dan *stunting* menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat *stunting* tinggi seperti Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat justru memiliki SPPG yang sangat minim, sementara SPPG terkonsentrasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang *stunting*-nya relatif rendah. Selanjutnya, silang data antara jumlah SPPG dengan jumlah penduduk menunjukkan pola bahwa jumlah SPPG cenderung mengikuti besaran populasi, bukan tingkat kebutuhan gizi. Provinsi berpenduduk besar memang membutuhkan lebih banyak fasilitas pelayanan. Namun, jika tujuan utama MBG adalah menurunkan *stunting*, maka pendekatan berbasis jumlah penduduk saja tidaklah cukup, daerah dengan prevalensi *stunting* tinggi seharusnya menjadi prioritas, terlepas dari besar kecilnya populasi. Jika ini terus dilanjutkan tanpa tujuan serta *outcome* yang tepat dan terukur, maka program MBG akan menjadi pemborosan anggaran terbesar sepanjang sejarah.

Lampiran 1. Perubahan Anggaran Kementerian 2025 & 2026

Miliar Rupiah

Kementerian/ Lembaga	APBN 2025	Outlook	APBN 2026	Perubahan
128 BADAN GIZI NASIONAL	71.000,0	116.649,7	268.000,0	277,5%
012 KEMENTERIAN PERTAHANAN	166.263,7	247.525,7	187.100,0	12,5%
060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	126.620,3	138.545,2	146.050,0	15,3%
145 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	110.952,7	85.737,3	118.500,0	6,8%
024 KEMENTERIAN KESEHATAN	105.649,4	86.085,5	114.000,0	7,9%
025 KEMENTERIAN AGAMA	78.602,2	69.838,6	88.897,7	13,1%
027 KEMENTERIAN SOSIAL	79.588,0	79.597,9	84.440,1	6,1%
139 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	57.681,3	52.923,2	61.873,9	7,3%
138 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	33.545,2	47.026,2	56.682,1	69,0%
015 KEMENTERIAN KEUANGAN	53.195,4	71.461,4	52.016,0	-2,2%
018 KEMENTERIAN PERTANIAN	29.374,0	27.300,8	40.145,0	36,7%
022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	31.456,2	23.095,1	28.489,4	-9,4%
006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	24.276,1	23.985,3	20.250,0	-16,6%
137 IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	15.962,1	15.122,5	18.849,1	18,1%
050 BADAN INTELIJEN NEGIRA	7.049,7	15.444,8	16.670,0	136,5%
005 MAHKAMAH AGUNG	12.684,1	11.424,4	14.753,8	16,3%
032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.220,6	6.583,7	13.000,0	109,0%
146 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.274,4	4.713,6	10.895,5	106,6%
011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9.896,6	8.700,0	10.220,5	3,3%
020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.909,7	4.363,8	10.118,0	158,8%
002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6.690,3	9.964,7	9.900,0	48,0%
056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6.454,8	6.455,0	9.499,3	47,2%
059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	7.728,9	9.522,1	8.624,3	11,6%
010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4.792,3	2.973,6	7.800,0	62,8%
054 BADAN PUSAT STATISTIK	5.705,9	4.717,6	6.927,0	21,4%
004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6.154,6	5.769,6	6.835,0	11,1%
143 KEMENTERIAN KEHUTANAN	5.158,5	5.376,0	6.039,3	17,1%
126 OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	6.395,5	4.745,0	4.855,3	-24,1%
135 KEMENTERIAN HUKUM	5.066,6	4.075,2	4.221,2	-16,7%
026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4.809,8	12.671,6	3.860,9	-19,7%
068 KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	4.400,2	3.833,3	3.638,0	-17,3%
076 KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.062,3	6.512,2	3.539,6	15,6%
051 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1.321,6	1.065,5	3.495,5	164,5%
075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.826,9	2.506,3	2.675,4	-5,4%
007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.901,9	3.047,9	2.609,4	-10,1%
055 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	1.971,0	1.234,4	2.597,0	31,8%
122 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	374,4	352,2	2.527,9	575,2%
112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.992,7	1.732,6	2.527,9	26,9%
151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.192,4	2.211,9	2.504,2	14,2%
019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.519,6	1.797,0	2.501,8	-0,7%
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	2.416,9	2.798,3	2.472,9	2,3%
089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	2.473,7	2.384,1	2.374,9	-4,0%
083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	352,3	198,4	2.271,3	544,7%
063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.560,9	1.736,1	2.247,0	-12,3%
152 KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	122,4	83,5	1.902,0	1454,0%
147 KEMENTERIAN PARIWISATA	1.488,7	1.330,6	1.851,7	24,4%
095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.303,7	1.300,2	1.800,0	38,1%
127 BADAN KARANTINA INDONESIA	1.420,5	1.213,2	1.796,1	26,4%
119 BADAN KEAMANAN LAUT	1.084,7	2.484,2	1.752,0	61,5%
113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	626,4	473,0	1.719,8	174,5%

Miliar Rupiah

Kementerian/ Lembaga	APBN 2025	Outlook	APBN 2026	Perubahan
093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	1.237,4	1.237,4	1.581,9	27,8%
107 BADAN SAR NASIONAL	1.497,6	1.209,7	1.553,7	3,7%
066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	2.455,1	2.313,6	1.516,6	-38,2%
140 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2.374,3	2.257,2	1.507,4	-36,5%
124 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5.842,3	4.739,0	1.504,8	-74,2%
090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.853,3	1.419,6	1.400,4	-24,4%
144 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1.079,8	1.050,5	1.396,4	29,3%
117 TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.524,2	1.389,4	1.159,7	-23,9%
092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.330,4	2.266,9	1.156,0	-50,4%
001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)	969,2	903,6	1.050,0	8,3%
116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.070,3	1.024,0	997,7	-6,8%
149 KEMENTERIAN KOPERASI	473,3	442,6	962,0	103,3%
065 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	681,9	603,2	775,1	13,7%
136 KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	174,3	113,8	718,1	312,0%
088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	798,3	804,6	639,5	-19,9%
141 BADAN PENYELENGGARA HAJI	129,7	171,7	579,0	346,4%
142 BADAN PENYELENGGARA AMANAN PRODUK HALAL	436,8	365,9	551,8	26,3%
150 KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	463,9	463,6	546,6	17,8%
104 KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	494,6	463,6	546,3	10,5%
148 KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	279,6	279,6	528,5	89,0%
103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPP)	1.427,6	2.014,4	491,0	-65,6%
035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	459,8	313,1	485,2	5,5%
111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)	267,1	179,4	469,6	75,8%
048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	393,0	310,1	393,0	0,0%
077 MAHKAMAH KONSTITUSI RI	611,5	611,5	379,3	-38,0%
057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721,7	442,1	378,0	-47,6%
129 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	268,3	226,1	358,0	33,4%
134 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	139,7	277,5	333,6	138,8%
078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	354,6	334,8	333,6	-5,9%
086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	328,5	282,5	293,3	-10,7%
041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277,5	136,5	280,3	1,0%
087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	293,8	217,5	279,3	-4,9%
132 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	230,0	202,2	262,6	14,2%
110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	255,6	216,6	252,0	-1,4%
036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	111,2	206,3	236,7	112,9%
130 KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	9,0	198,7	221,9	2365,9%
106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	166,7	117,1	216,3	29,7%
047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300,7	153,7	214,1	-28,8%
064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,1	145,0	212,0	13,3%
131 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	44,1	194,1	207,0	369,4%
100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	184,5	178,9	195,3	5,8%
084 BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)	223,9	223,3	190,0	-15,1%
108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	105,4	90,5	163,5	55,1%
074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	160,5	140,7	161,6	0,7%
085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)	156,7	119,1	117,7	-24,9%
118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	53,5	27,5	36,5	-31,8%
123 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229,9	161,5	8,9	-96,1%
125 BADAN PANGAN NASIONAL	330,0	2.692,0	4,7	-98,6%
052 DEWAN NASIONAL	54,7	12,1	0,0	-100,0%
Total	1.160.085,0	1.160.085,0	1.506.164,4	29,8%



Terima Kasih